

LAPORAN RENCANA KERJA TRIWULAN I DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2025



May 2025 at 10.48.26 GMT+7

May 2025 at 10.48.26 GMT+7

19° 16.227", E 100° 33' 30.684"

Kabupaten Pesisir Selatan

Sumatra Barat

Indonesia

Tempat: Rapat Penganangan Plakat Turun ke Sawah
Tanggal: 26 dan MT Oktober 2025

Painan, April 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Perubahan Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pertanian ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Perubahan Renja Triwulan I Tahun 2025 ini berisikan informasi tentang kinerja pembangunan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner selama Triwulan I Tahun 2025, kendala/permasalahan yang ada dan upaya pemecahannya.

Demikian Laporan Perubahan Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, Terima kasih.

Painan, 9 April 2025
Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Tujuan Evaluasi Perubahan Renja.....	5
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025.....	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.	6
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	8
BAB III PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	13
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	13
3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	16
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Rekomendasi.....	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	7
Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 3.3	Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 - 2025.....	17
Tabel 3.4	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 - 2025.....	18
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian.....	19
Tabel 3.6	Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintah. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) merupakan Amanat Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh perangkat daerah meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja perangkat daerah sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappedalitbang. Kemudian Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan dan hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

- Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 29. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun 2025; dan

30. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Tujuan Evaluasi Renja

Tujuan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tercantum dalam Renja Tahun 2025, guna:

1. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021 – 2026;
2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2025 serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana strategis (Renstra) adalah pedoman yang digunakan setiap lembaga/institusi untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan. Renstra memuat tujuan, tata nilai, dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapainya. Rencana strategis yang disusun dengan baik dapat memainkan peran penting untuk mencapai tujuan, visi dan misi, karena ia memberi tahu semua pihak cara merespon peluang, tantangan, tujuan, dan sasaran yang realistis. Renstra berfungsi untuk memberikan panduan kerja, menentukan capaian dan strategi, Renstra merupakan living dokumen, yang dapat digunakan untuk dijadikan acuan apakah rencana yang sudah ditetapkan tercapai atau belum.

Untuk mengetahui capaian Renstra tersebut tercapai atau belum, maka perlu dilakukan evaluasi capaian renstra untuk mengukur keberhasilan tata kelola yang sudah dilakukan Lembaga, selanjutnya dilakukan perbaikan pengendalian dan pengembangan atau peningkatan. Evaluasi hasil pelaksanaan program pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Outlook 2021	Target Tahun ke					Realisasi Tahun ke			Ket
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
		3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN											
		3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dan Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	91,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI				-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI				-	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan		
PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)				-	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)		
JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)				-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
III	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	468.149,00	503.846,00	514.094,00	524.579,00	535.308,00	546.287,00	503.846,00	487.867,00	487.867,00	
PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)				50,75	52,88	53,14	53,49	53,61	53,72	47,21	31,28	19,30		
PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KW/HA)				58,14	68,92	70,17	71,47	72,53	73,62	68,92	61,60	57,00		
PERSENTASE TERNAK UNGGUL (%)				7,00	27,31	28,00	28,70	29,41	30,15	27,31	26,19	31,15		
JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)				468.149,00	503.846,00	514.094,00	524.579,00	535.308,00	546.287,00	503.846,00	487.867,00	487.867,00		
3.27.03.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	1,30	1,62	1,70	1,79	1,88	2,00	1,62	1,63	1,78		
PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN/GALUR TERNAK (%)			-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-	25,00	25,00			
PERSENTASE PENGADUAAAN/ SARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)			-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-	25,00	25,00			
3.27.04.		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)			2,32	3,87	4,28	4,47	4,68	4,91	2,77	-0,82	0,41			
PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)			100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
3.27.05.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
3.27.06.		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)			29,60	30,27	32,00	34,00	37,00	40,00	30,27	32,00	-			
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	25,00	219,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	219,00	100,00	130,00	
JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)			-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00		

Sumber : Bagian Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun anggaran. Adapun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.28.475.354.518,00 mendapatkan penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.338.827.646,00 dengan realisasi sampai triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.4.398.619.152,00 atau sebesar 19,69% (Laporan Evaluasi Renja pada lampiran).

2.2.1 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Pertanian	A (89,98)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,16 Trilyun

A. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja

I. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 98,82%)

Target kinerja indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 98,82% (capaian berdasarkan data capaian Tahun 2023), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renja serta

kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.18.279.854.518,00 dengan nilai pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.18.271.312.930,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I Rp.4.389.688.152,00 atau sebesar 24,01%.

B. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:

I. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 90%).

Target kinerja indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 90% (capaian berdasarkan data capaian Tahun 2024), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi,

persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 dengan nilai pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.10.136.612,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I Rp.0,00 atau sebesar 0,00%.

C. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan, dengan indikator kinerja yaitu:

I. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) (Triliyun)

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 96,52%)

Target kinerja indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 96,52% (capaian berdasarkan data capaian Tahun 2023), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian, persentase kelompok tani yang menerapkan sop (standar operasional prosedur) budidaya pertanian, produktivitas pertanian per hektar per Tahun dan persentase ternak unggul. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.1.698.985.074,00, nilai pagu sebesar Rp.60.000.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp.4.671.000,00 atau sebesar 7,79%.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan pembangunan prasarana pertanian. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.6.658.807.415,00, nilai pagu anggaran sebesar Rp.647.727.800,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini masih Rp.0,00 atau 0,00%.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan menekan perkembangan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis dan pengawasan hewan dan produk hewan. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.623.196.585,00, nilai pagu anggaran sebesar Rp.26.342.410,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp.515.000,00 atau sebesar 1,96%.

d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan perlindungan produksi pertanian terhadap serangan OPT dan Bencana Pertanian. Adapun capaian kinerja program ini adalah persentase pengendalian dan pengendalian bencana pertanian sampai 100 (seratus) persen. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.323.503.000,00, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.0,00, Untuk Tahun 2025 program ini tidak dianggarkan..

e) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha pertanian yang memiliki izin usaha di sektor pertanian. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.58.012.926,00. nilai pagu anggaran sebesar

Rp.65.183.726,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00%.

f) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Kelompok Tani naik kelas sebanyak 100 (seratus) unit dan Balai Penyuluh Pertanian yang naik kelas sebanyak 1 (satu) unit. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.832.995.000,00, nilai pagu anggaran sebesar Rp.3.258.124.168,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp.3.745.000,00 atau sebesar 0,11%.

BAB III
PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PERTANIAN DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 520/186/Kpts/DISTAN-PS/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Penetapan IKU Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menentukan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

b) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian

Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut

yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah. Untuk menentukan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

c) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB. Untuk menentukan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah Jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) Tahun.

Target dan capaian realisasi IKU Dinas Pertanian dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN KE						REALISASI TAHUN KE						RASIO REALISASI TAHUN KE					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Nilai Tukar Petani	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	91,89 (AA)	88,77 (A)	88,92 (A)	88,92 (A)	-	-	104,18	100,15	99,81	99,32		-
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	-	85	100	100	100	100	-	85,00	92,00	90,00	-	-	-	100,00	92,00	90,00		
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Trilyun	2,90	2,98	3,04	3,10	3,16	3,23	2,90	2,98	3,05	3,05	-	-	100,00	100,00	100,33	98,36			-
Rata-Rata																			102,09	100,05	97,38	95,89		

*Catatan : Data capaian Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2024 Memakai Data Capaian Tahun 2023
Data capaian Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 Memakai Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026*

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian IKU Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 95,89% dengan prediket **sangat baik**. Capaian tertinggi pada sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian yaitu sebesar 99,32% dan yang terendah adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian yaitu sebesar 90%.

3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu IKD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian IKD berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan IKD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan IKD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi :

- a) Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah; dan
- b) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi IKK dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum, dan aspek Daya Saing Daerah.

a) Indikator Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator Kinerja

Makro Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat seperti Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Outlook 2021	Target Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)		70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
	a. Usia Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92
	b. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43
	c. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57
	d. Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp/org/thn	9.325	9.369	9.534	9.734	9.949	10.182
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,55	2,89	4,14	4,52	4,62	4,74
3	PDRB ADHK	Rp. Triliyun	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
4	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	19,69	20,05	20,66	21,37	22,12	22,94
5	Indek Gini		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,93	6,85	6,73	6,61	6,46	6,30
7	Tingkat Kemiskinan	%	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16
8	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	38,43	38,25	38,03	37,78	37,51	37,21

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan secara langsung mendukung pencapaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat (Indikator Kinerja Makro Ekonomi) yaitu PDRB ADHK, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merepresentasikannya ke dalam target kinerja perangkat daerah yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK). Target dan realisasi nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024*
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Triliyun	2,98	3,05	3,05

Catatan : * : Data Capaian Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.3 diatas dapat diuraikan bahwa nilai PDRB Sektor Pertanian Tahun 2022 sebesar 2,98 triliyun, Tahun 2023 sebesar

3,05 triliun dan Tahun 2024 sebesar 3,05 triliun (memakai angka capai Tahun 2023, karena nilai PDRB Sektor Pertanian Tahun 2024 belum publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan). Kontribusi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) sebesar 28,47%, Tahun 2023 sebesar 28,06% dan Tahun 2024 sebesar 28,06%. Dari angka capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) sebagai penyumbang terbesar terhadap Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 (dua) Tahun berturut - turut. Kontribusi per sub sektor terhadap PDRB Sektor Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor
Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 - 2024

No	Sub Sektor	Tahun		
		2022	2023	2024*
1	Tanaman Pangan	11,34	11,57	11,57
2	Tanaman Hortikultura Semusim	0,84	0,90	0,90
3	Perkebunan Semusim	0	0	0
4	Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,22	1,12	1,12
5	Perkebunan Tahunan	11,67	11,09	11,09
6	Peternakan	2,80	2,80	2,80
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,59	0,58	0,58
Total		28,47	28,06	28,06

*Catatan : * : Data Capaian Tahun 2023*

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa sub sektor perkebunan Tahunan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian yang kemudian diikuti oleh sub sektor tanaman pangan, peternakan, tanaman hortikultura Tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim dan jasa pertanian dan perburuan. Sub sektor perkebunan Tahunan banyak disumbangkan pada komoditi kelapa sawit dan tanaman pangan pada komoditi padi dan jagung.

b) Indikator Pada Aspek Pelayanan Umum

Indikator pada Aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yaitu Layanan Urusan Wajib Dasar dan Layanan Urusan Pilihan. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewenangan Layanan Urusan Pilihan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Layanan Urusan Pilihan sektor pertanian yang terdiri dari 2 (dua) IKK seperti pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per Tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per Tahun}}{\text{Luas panen}}$
2	Pertanian	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{(\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular Tahun } n - \text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular Tahun } n-1)}{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular Tahun } n-1} \times 100\%$

Data capaian realisasi IKK urusan pemerintahan sektor pertanian dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Realisasi IKK		
				2022	2023	2024
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per Tahun	Ton/ha	6,89	6,16	5,69*
2	Pertanian	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5,86	-81,26	4,52

Catatan :* Angka Sementara (ASEM Tahun 2024)

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa capaian IKK produktivitas pertanian per hektar per tahun pada Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 8,26% (dari 6,16 ton/ha menjadi 5,69 ton/ha), hal ini disebabkan turunnya produktivitas padi dan jagung yang mana pada Tahun 2022 produktivitas padi Tahun 2023 sebesar 5,20 ton/ha menjadi 4,80 ton/ha Tahun 2024 dan jagung dari 8,66 ton/ha pada Tahun 2023 menjadi 7,40 ton/ha Tahun 2024.

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dari -81,26% pada Tahun 2023 menjadi 4,52% Tahun 2024. Selama Tahun 2024 jumlah kasus penyakit jembrana mengalami peningkatan kejadian sebesar 85,68% dari Tahun 2023.

c) Indikator Kinerja Pada Aspek Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Melalui Laporan Evaluasi Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten pada kondisi triwulan I Tahun 2025, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan; dan
3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya;
2. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan; dan
3. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, dapat memperoleh gambaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Tahun 2025. Di masa mendatang,

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Painan, 9 April 2025

Kepala Dinas



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	26,80	25,70	25,70	24,68	24,68*
2.	Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	13,54	11,67	11,34	11,57	11,57*
3.	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB(%)	11,03	11,83	11,67	11,09	11,09*
4.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (kw/ha)	58,42	65,38	70,91	61,02	56,92
5.	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
6.	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB (%)	2,56	2,74	2,80	2,80	2,80*
7.	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
8.	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	33,16	10,45	5,86	-81,26	4,52
9.	Cakupan Pengawasan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan (%)	100	100	100	100	100
10.	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,01	29,06	28,47	28,06	28,06*
11.	Persentase Pertanian Per Hertare Per Tahun	-	-	-	-	-
12.	Jumlah Kasus Zoonosis Yang Daporkan (Kasus)	134	148	155	310	212

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		7		8		9		10				11			12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9		3.27.01.2.03.0001	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.00	450,000,000.00	2.00	94,609,700.00	1.00	54,130,118.00	0.25	20,330,300.00	-	-	-	-	0.25	20,330,300.00	2.25	114,940,000.00	56.25	25.54					
10		3.27.01.2.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	39.00	15,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11		3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.00	19,205,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100.00	1,560,738,400.00	-	-	17,128,700.00	-	880,000.00	-	-	-	-	-	-	880,000.00	-	880,000.00	-	0.06					
				Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (orang)	20.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12		3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	1,200.00	1,049,994,375.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13		3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48.00	21,025,500.00	-	-	12.00	5,000,700.00	3.00	880,000.00	-	-	-	-	3.00	880,000.00	3.00	880,000.00	6.25	4.19					
14		3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20.00	429,420,000.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15		3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1,200.00	60,298,525.00	-	-	160.00	12,128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.00	2,879,770,540.00	100.00	963,699,923.00	-	325,630,420.00	-	58,341,600.00	-	-	-	-	-	58,341,600.00	100.00	1,022,041,523.00	100.00	35.49					
				Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%)	100.00	-	50.00	-	25.00	-	6.25	-	-	-	-	-	6.25	-	56.25	-	56.25	-					
				Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%)	98.00	-	96.00	-	1.00	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	96.25	-	98.21	-					
				Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran (%)	100.00	-	50.00	-	25.00	-	6.25	-	-	-	-	-	6.25	-	56.25	-	56.25	-					
16		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.00	94,268,290.00	3.00	29,942,632.00	1.00	11,398,800.00	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	3.25	29,942,632.00	65.00	31.76					
17		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73.00	507,168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18		3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.00	183,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
19		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.00	360,428,110.00	3.00	115,120,610.00	1.00	34,962,780.00	0.25	19,998,000.00	-	-	-	-	0.25	19,998,000.00	3.25	135,118,610.00	65.00	37.49					
20		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.00	324,856,140.00	3.00	85,064,550.00	1.00	19,999,740.00	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	3.25	85,064,550.00	65.00	26.19					
21		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	15.00	31,640,000.00	9.00	15,690,000.00	3.00	7,200,000.00	0.75	360,000.00	-	-	-	-	0.75	360,000.00	9.75	16,050,000.00	65.00	50.73					
22		3.27.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60.00	69,970,000.00	36.00	23,722,000.00	12.00	15,400,000.00	3.00	-	-	-	-	-	3.00	-	39.00	23,722,000.00	65.00	33.90					
23		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,250.00	1,223,240,000.00	750.00	684,704,531.00	250.00	224,983,000.00	62.50	37,983,600.00	-	-	-	-	62.50	37,983,600.00	812.50	722,688,131.00	65.00	59.08					
24		3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.00	85,000,000.00	1.00	9,455,600.00	1.00	11,686,100.00	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	1.25	9,455,600.00	31.25	11.12					
6		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan (%)	100.00	1,198,290,000.00	40.00	135,425,500.00	20.00	314,715,971.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00	135,425,500.00	40.00	11.30	-					
25		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	20.00	481,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	260.00	427,690,000.00	0.93	42,000,000.00	78.00	180,581,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	42,000,000.00	0.96	9.82					
27		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33.00	289,600,000.00	9.54	93,425,500.00	18.00	134,134,071.00	-	-	-	-	-	-	-	9.54	93,425,500.00	28.91	32.26	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
10		3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan yang Dimurnikan dan dilestarikan (Jenis)	54.00	17,871,456,170.00	18.00	2,196,846,113.00	6.00	252,543,704.00	1.50	4,671,000.00	-	-	-	-	1.50	4,671,000.00	19.50	2,201,517,113.00	36.11	12.32			
				Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersedia (Kg)	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah Bibit Buah-Buahan yang tersedia (Batang)	12,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,110.00	-	-	31.91		
				Jumlah Benih Sayur - Sayuran yang tersedia (Kg)	5,001.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,001.37	-	-	60.02		
				Tersedianya bibit Perkebunan yang tersedia (Batang)	84,010.00	-	4,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,960.00	-	-	5.90		
				Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10,500.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	19.05		
				Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)	75.00	-	66.25	-	4.33	-	1.08	-	-	-	-	-	1.08	-	-	67.33	-	-	89.78		
41		3.27.02.2.02.0001.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	12.00	775,680,000.00	12.00	250,726,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	250,726,214.00	100.00	32.32			
42		3.27.02.2.02.0002.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15.00	1,093,351,220.00	6.00	226,714,280.00	3.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	226,714,280.00	40.00	20.74			
43		3.27.02.2.02.0003.	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15.00	15,402,424,950.00	6.00	1,628,356,235.00	3.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	1,628,356,235.00	40.00	10.57			
44		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Varietas Unggul Baru/VUB)	12.00	450,000,000.00	4.00	91,049,384.00	4.00	150,000,000.00	1.00	4,671,000.00	-	-	-	-	1.00	4,671,000.00	5.00	95,720,384.00	41.67	21.27			
45		3.27.02.2.02.0005.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	6.00	150,000,000.00	-	-	2.00	62,542,704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11		3.27.02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	60.00	565,000,000.00	-	-	15.00	81,157,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jenis Pakan Ternak yang Tersedia (Jenis)	20.00	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46		3.27.02.2.03.0001.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	60.00	245,000,000.00	-	-	15.00	56,738,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47		3.27.02.2.03.0002.	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	90.00	320,000,000.00	-	-	25.00	24,418,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12		3.27.02.2.04.	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Kios atau Pengecer Obat Hewan yang dilakukan (%)	100.00	412,500,000.00	-	-	100.00	33,771,476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48		3.27.02.2.04.0001.	Pemeriksaan Mutu, Keaslian dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Keaslian dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	68.00	310,000,000.00	-	-	18.00	33,771,476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49		3.27.02.2.04.0002.	Penindakan atas penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	4.00	102,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13		3.27.02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Laporan)	15.00	28,889,853,060.00	15.00	1,919,641,340.00	-	65,199,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	1,919,641,340.00	100.00	6.64			
				Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	100.00		
				Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (BT) (%)	50.00	-	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.33	-	-	66.66		
				Jumlah Ternak yang tersedia (Ekor)	71,149.00	-	10,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,924.00	-	-	15.35		
50		3.27.02.2.05.0001.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Laporan)	2.00	12,861,900,000.00	2.00	1,020,594,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,020,594,800.00	100.00	7.94			
51		3.27.02.2.05.0003.	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar dan Bersertifikat (Ekor)	44,000.00	2,489,009,950.00	10,000.00	231,402,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	231,402,750.00	22.73	9.30			
52		3.27.02.2.05.0004.	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/ Pakan yang beredar (Ton)	40,000.00	190,000,000.00	-	-	10,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53		3.27.02.2.05.0005.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	40,000.00	2,408,999,950.00	10,000.00	483,682,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	483,682,720.00	25.00	20.08			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
64		3.27.03.2.02.0004.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	11.00	2,322,244,000.00	3.00	406,042,500.00	2.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	406,042,500.00	27.27	17.49			
65		3.27.03.2.02.0006.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	10.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
66		3.27.03.2.02.0007.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1.00	1,001,000,000.00	-	11,222,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,222,000.00	-	1.12			
67		3.27.03.2.02.0008.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	15.00	7,497,857,950.00	4.00	1,600,656,270.00	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,600,656,270.00	26.67	21.35			
68		3.27.03.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	44.00	9,324,842,890.00	21.00	5,943,013,285.00	2.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00	5,943,013,285.00	47.73	63.73			
69		3.27.03.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	60.00	11,888,000,000.00	-	9,120,000.00	20.00	208,800,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,120,000.00	-	0.08			
70		3.27.03.2.02.0011.	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana uruk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
71		3.27.03.2.02.0014.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	-	-	2.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
72		3.27.03.2.02.0015.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1.00	6,000,000,000.00	-	-	1.00	6,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17		3.27.03.2.03.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	75.00	1,169,059,060.00	15.00	380,516,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	380,516,470.00	20.00	32.55			
				Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak Yang Dikelola (Jenis)	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
73		3.27.03.2.03.0001.	Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarian dan Dimanfaatkan (Laporan)	75.00	1,048,721,560.00	15.00	380,516,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	380,516,470.00	20.00	36.29			
74		3.27.03.2.03.0002.	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	60.00	120,337,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18		3.27.03.2.04.	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum (Ha)	10,000.00	431,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75		3.27.03.2.04.0001.	Identifikasi dan Peningkatan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang diidentifikasi dan ditingkatkan (Ha)	10,000.00	143,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
76		3.27.03.2.04.0002.	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang dikelola (Ha)	10,000.00	143,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
77		3.27.03.2.04.0003.	Pembinan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	60.00	143,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140.00	10,031,627,700.00	155.00	1,151,393,071.00	-	623,196,585.00	-	515,000.00	-	-	-	-	515,000.00	155.00	1,151,908,071.00	110.71	11.48					
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)	4.91	-	4.49	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	4.49	-	91.45	-	-				
				PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)	100.00	-	60.00	-	20.00	5.00	-	-	-	-	-	5.00	65.00	-	65.00	-	-					
19		3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Terjaminnya kesehatan hewan/ternak dan kematian ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Bulan)	12.00	5,695,377,270.00	12.00	353,128,430.00	-	247,411,019.00	-	515,000.00	-	-	-	-	515,000.00	12.00	353,643,430.00	100.00	6.21					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
23		3.27.04.2.05.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3.00	60,000,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106		3.27.04.2.05.0001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3.00	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106		3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	-	-	-	-	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	100.00	4,650,077,285.00	60.00	841,237,840.00	20.00	323,503,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	841,237,840.00	60.00	18.09	-	
24		3.27.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit Tumbuhan (%) Luas Areal Lahan yang Dapat ditangani dari pasca bencana pertanian (Ha)	100.00	4,650,077,285.00	60.00	841,237,840.00	20.00	323,503,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	841,237,840.00	60.00	18.09	-	
					1,750.00		1,032.38		350.00												1,032.38		58.99			
107		3.27.05.2.01.0001.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	37,495.00	3,613,309,160.00	23,456.59	640,050,040.00	7,119.00	323,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,456.59	640,050,040.00	62.56	17.71	-	
108		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani (Ha)	100.00	96,363,125.00	-	-	25.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	-	-	-	-	42,184.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110		3.27.05.2.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	75.00	940,405,000.00	30.00	201,187,800.00	15.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	201,187,800.00	40.00	21.39	-	
VI	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT) PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	190.00	1,513,105,450.00	190.00	62,945,550.00	-	58,012,926.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00	62,945,550.00	100.00	4.16	-	
					40.00		30.27		6.73		1.68									31.95		79.88				
25		3.27.06.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian (Dokumen) Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Pemohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit) Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	10.00	852,444,200.00	10.00	62,945,550.00	-	48,011,938.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	62,945,550.00	100.00	7.38	-	
					48.00		12.00		12.00												12.00		25.00			
					775.00		295.00		160.00												295.00		38.06			
111		3.27.06.2.01.0001.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	8.00	157,581,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112		3.27.06.2.01.0002.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	48.00	435,991,700.00	12.00	35,442,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	35,442,600.00	25.00	8.73	-	
113		3.27.06.2.01.0004.	Sertifikasi unit usaha pembibitan/budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	-	-	1.00	5,511,938.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114		3.27.06.2.01.0005.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	775.00	258,871,500.00	295.00	27,502,950.00	160.00	42,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.00	27,502,950.00	38.06	10.62	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100%	16											
26		3.27.06.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Pertanian Yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	8.00	537,290,000.00	-	2.00	9,998,988.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	20.00		-	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
115		3.27.06.2.02.0001.	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	60.00	139,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
116		3.27.06.2.02.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi (Laporan)	60.00	53,016,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
117		3.27.06.2.02.0003.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi (Laporan)	40.00	53,016,250.00	-	10.00	9,998,988.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
118		3.27.06.2.02.0004.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	4.00	255,670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
119		3.27.06.2.02.0005.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi (Laporan)	4.00	35,677,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27		3.27.06.2.03.	Izin Usaha Pengecur (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecur (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan (Laporan)	28.00	123,371,250.00	-	7.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
120		3.27.06.2.03.0001.	Fasilitas Penuh Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecur Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecur Obat Hewan yang memenuhi komitmen (laporan)	8.00	35,677,500.00	-	2.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
121		3.27.06.2.03.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecur Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecur Obat Hewan yang diawasi (laporan)	20.00	87,693,750.00	-	5.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VII	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	619.00	20,895,733,864.00	449.00	21,166,311,244.00	100.00	832,995,000.00	-	3,745,000.00	-	-	-	-	3,745,000.00	449.00	21,170,056,244.00	72.54	101.31					
				JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	4.00		2.00		1.00									2.00		50.00						
28		3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) (%)	100.00	20,895,733,864.00	60.00	21,166,311,244.00	20.00	832,995,000.00	5.00	3,745,000.00	-	-	-	-	5.00	3,745,000.00	65.00	21,170,056,244.00	65.00	101.31				
				Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	46.39		35.24		6.34		1.59						1.59		36.83		79.38					
				Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5,536.00		2,132.00		1,115.00									2,132.00		38.51						
				Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang Berkondisi baik (%)	92.50		83.33		3.67		0.92						0.92		84.25		91.08					
				Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang Berkondisi baik (%)	91.88		81.50		6.63		1.66						1.66		83.16		90.51					
				Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran (%)	48.88		48.88		-		-						-		48.88		100.00					
122		3.27.07.2.01.0001.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75.00	6,129,101,260.00	45.00	2,073,030,949.00	15.00	530,000,000.00	3.75					3.75		48.75	2,073,030,949.00	65.00	33.82					
123		3.27.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5,536.00	3,580,726,090.00	2,133.00	718,482,301.00	1,115.00	127,995,000.00	-	3,745,000.00	-	-	-	-	3,745,000.00	2,133.00	722,227,301.00	38.53	20.17					

